



**IMPLEMENTASI PERAN DAN FUNGSI DEWAN
PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
(Berdasarkan Lampiran 1 Kepmendiknas N0 044/U/ 2002
Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah)**

**THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL COMMITTEE'S ROLE
AND FUNCTION IN JEMBER REGION(IS BASED ON ENCLOSURE 1 OF
KEPMENDIKNAS NUMBER 44/U/2002 DEALING WITH THE
EDUCATIONAL COMMITTE AND SCHOOL COMMITTE)**

TESIS

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Oleh :

A. Zulkarnain Ali, S.Ip

040920101001

Pembimbing tesis

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, Pembimbing Utama

Drs. H. Boedijono, M.Si, Pembimbing Anggota

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
2008**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRAC	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I : PENDAHULUAN	Halaman
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.2 Konsep Kebijakan Publik.....	15
2.3 Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	18
2.3.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle.....	23
2.3.2 Model Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn.....	25
2.3.3 Model Implementasi Kebijakan Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier.....	30
2.3.4 Implementasi Kebijakan Menurut Edward III.....	30

BAB III : KERANGKA KONSEPTUAL	39
3.1. Implementasi peran dan fungsi dewan pendidikan Kabupaten Jember Berdasarkan lampiran 1 Kepmendiknas No 44/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah.....	39
3.3.1 Peran.....	39
3.3.2 Fungsi	39
3.2 Variabel Yang Mempengaruhi Peran dan Fungsi Dewan Pendidikan	41
 BAB IV: METODE PENELITIAN	42
3.1 Paradigma penelitian Penelitian.....	43
3.2 Lokasi Penelitian.....	43
3.3 Teknik Analisa Data.....	44
3.6 Definisi Operasional.....	46
3.7 Teknil pengumpulan data.....	50
3.8 Metodologi analisa.....	51
 BAB V :HASIL PENELITIAN, ANALISIS DAN PEMBAHASAN	47
5.1 Kondisi Geografis Kabupaten Jember.....	47
5.2 Gambaran Umum Pendidikan di Kabupaten Jember.....	49
5.3 Pendidikan dan Desentralisasi	56
5.4 Gambaran Umum Dewan Pendidikan Kabupaten Jember.....	59
5.5 Hasil Penelitian	63
5.5.1 Implementasi Peran dan Fungsi dewan pendidikan Jember berdasarkan lampiran 1 Kepmendinas No 44/ U / 2002 tentang Dewan pendidikan dan Komite sekolah	63
5.6 Faktor komunikasi.....	68

5.6.1 Transmisi	70
5.6.2 Kejelasan.....	71
5.6.3 Konsistensi.....	72
5.7 Faktor Sumber- Sumber.....	70
5.7.1 Staf.....	70
5.7.2 Informasi.....	71
5.7.3 Wewenang.....	72
5.7.3.1 Peran Dewan Pendidikan : pemberi pertimbangan (<i>advisorr</i>).....	72
5.7.3.2 Peran Dewan Pendidikan : Sebagai Pendukung (<i>supporting</i>).....	73
5.7.3.3 Peran Dewan Pendidikan : Sebagai Pengontrol (<i>controlling</i>).....	74
5.7.3.4 Peran Dewan Pendidikan : Sebagai Mediator.....	75
5.8 Faktor Kecenderungan – Kecenderungan.....	77
5.9 Struktur Birokrasi.....	79
4.9.1 Standart Operating Prosedures(SOP).....	79
4.9.2 Fragmentasi	79
5.10 Efektifitas Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pendidikan Kabupaten Jember berdasar lampiran 1 Kepmendinas No 44/ U / 2002 tentang Dewan pendidikan dan Komite sekolah.....	82
5.11 Analisis data.....	90

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN.....107

6.1 Simpulan.....	107
6.2 Implikasi Teoritik.....	108
6.3 Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA.110

LAMPIRAN

RINGKASAN

Implementasi Peran Dan Fungsi Dewan pendidikan Kabupaten Jember (Berdasarkan Lampiran 1 Kepmendiknas No 44/ U/ 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah), A. Zulkarnain Ali; 04920101001; 2008; 109 Halaman; program studi ilmu administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Jember

Penelitian tesis ini didasarkan pada Lampiran 1 Kepmendiknas No 44/ U/ 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah, mengenai peran dan fungsi dewan pendidikan kabupaten Jember merupakan salah satu bentuk respon pemerintah dalam mendukung otonomi daerah yang tujuannya untuk mengatasi masalah keterbatasan pemerataan dan mutu pendidikan di Indonesia. Dalam konsep desentralisasi pendidikan masyarakat dianggap sebagai pihak yang paling menentukan terhadap pelaksanaan dan penyalenggaraa sistem pendidikan. Salah satu wadah untuk memfungsikan masyarakat ditingkat kabupaten / kota dilaksanakan dewan pendidikan . oleh sebab itu, penelitian yang dilakukan di dewan pendidikan kabupaten Jember bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa implementasi peran dan fungsi di samping juga mendeskripsikan dan menganalisa faktor- faktor yang menjelaskan hasil implementasi peran dan fungsi (Berdasarkan Lampiran 1 kepmendiknas No 44/ U/ 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah) .

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pemanfaatan penelitian kualitatif deskriptif ini adalah untuk meneliti proses implementasi kebijakan dengan cara mendeskripsikan sejumlah variable yang dikembangkan atas model Geogre Edward III. Jadi disini peneliti ingin meneliti tentang implementasi Lampiran 1 Kepmendiknas No 44/ U/ 2002 tentang peran dan fungsi dewan pendidikan Kabupaten Jember secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif berdasarkan atas variable- variable yang ada dalam model implementasi yang dikembangkan oleh george Edward III, dengan menggunakan Purposif sampling dan jumlah informan sebanyak 5 orang yang terdiri dari unsur dewan pendidikan, komite sekolah, pemerintah, DPRD, unsur masyarakat.

Dari penelitian ini dapat diketahui permasalahan yang dapat menghambat kinerja pelaksanaan kebijakan seperti Komunikasi, sumber- sumber, kecenderungan- kecederungan struktur birokrasi ,faktor sumber – sumber; ; mengenai staff dewan pendidikan Kabupaten Jember tidak sesuai dengan Kebijakan Mendiknas,wewenang yang sudah jelas namun ada pelaksanaan dilapangan wewenang formal yang didistribusikan tidak sesuai dengan peraturan yang ada kepada setiap pelaksana karena bidang- bidang yang ada tidak berfungsi dengan baik karena kerja- yang seharusnya dilakukan pengurus bidang dilakukan oleh unsur pengurus harian kemudian, informasi yang mendukung kebijakan mulai dari informasi dari tahap – tahap pelaksanaan dan informasi tentang kegiatan tentang ketaatan – ketaatan personil serta adanya fasilitas - fasilitas fisik berupa dana bantuan berupa uang dari dan APBN dan APBD sudah tersedia namun dalam pelaksanaannya masih kurang konsisten dan transparan Unsur terahir adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi dan Fragmentasi disini ditunjukkan melalui penyebaran wewenang antar bagian pengurus dewan pendidikan yang di bagi dalam tugas – tugas sesuai dengan bidang - masing masing namun dalam pelaksanaannya peran pengurus tumpang tindih dengan pengurus harian hal ini menyebabkan tidak tidak tercapainya penyebaran tanggung jawab pengurus dalam melaksanakan kegiatan pada unit kerja sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa Implem,entasi peran dan fungsi dewan pendidikan Kabupaten Jember tahun 2007 Berdasarkan Lampiran 1 Kepmendiknas No 44/ U/ 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah adalah tidak efektif karena dari keempat unsur variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan tidak satupun tercapai dengan baik..

ABSTRACT

The implementation of educational committee's role and function is based on the enclosure I of Kepmendiknas number 44/U/2002 dealing with the educational committee and school committee; A. Zulkarnain Ali, S. Ip, 040920101001; 2008; 109, Public administration program, faculty of politic and social science post graduated program of Jember University.

This research is based on the enclosure I of Kepmendiknas number. 44/U/2002 dealing with educational committee and school committee. educational committee's role and function is one of programs taken by the government to respond the regent autonomy that is mainly focused to overcome the problems of educational limitations. The limit of generalization and educational quality in the concept of public educational decentralization is considered as a main part to determine the application and the management of educational system. Educational committee has function to optimize society in the regional level. Furthermore, this research on educational committee in Jember region is to describe and analyze the implementation of educational committee's role and function in Jember region. Besides, this research also describes and analyzes the factors which explain the result of the implementation of educational committee's role and function (based on enclosure I Kepmendiknas number 44/U/2002 concerning with Educational committee and school committee)

By using qualitative data technique analysis, The Utilization of this research to know the process of policy implementation by describing a number of variables which is expanded with George Edward III model. So, the researcher wants to research the implementation of educational committee's role and function is based on the enclosure I of Kepmendiknas number 44/U/2002 dealing with the educational committee and school committee intensively, much deeper, and comprehensive based on variables on Edward III, by using sampling purposive and the number of informants (5 quantity) who comprise with educational committee's element, government element, assembly at the provincial and educational societies element.

From this research can be known the result of the implementation of educational committee's role and function can be known through the problems that hamper the implementation policy as : Communication, resources, accompanying of bureaucratization structure, the educational staff structure is not appropriate on Mendiknas policy, the authority is clear but the implementation is not appropriate on Mendiknas Policy to each implementor, the information which supporting the policy from the first implementation and the implementation of implementors loyalty and the physical facility as donation from APBD and APBN was available but the implementation is less consistent and transparent the end of factor is bureaucracy. bureaucracy and fragmentation factor is indicated through the distribution of authority between implementors of educational committee which is divided on the duty appropriate the duty but the implementation is not appropriate of enclosure I of Kepmendiknas number 44/U/2002 dealing with the educational committee and school committee; the researcher concludes that the role and the function of educational committee is not effective, it is because the variables are not achieved well based on Edward III

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRAC	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I : PENDAHULUAN	Halaman
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaart Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.2 Konsep Kebijakan Publik.....	15
2.3 Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	18
2.3.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle.....	23
2.3.2 Model Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn.....	25
2.3.3 Model Implementasi Kebijakan Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier.....	30
2.3.4 Implementasi Kebijakan Menurut Edward III.....	30

BAB III : KERANGKA KONSEPTUAL.....	39
3.1. Implementasi peran dan fungsi dewan pendidikan Kabupaten Jember Berdasarkan lampiran 1 Kepmendiknas No 44/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah.....	39
3.3.1 Peran.....	39
3.3.2 Fungsi	39
3.2 Variabel Yang Mempengaruhi Peran dan Fungsi Dewan Pendidikan	41
 BAB IV: METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Paradigma penelitian Penelitian.....	43
3.2 Lokasi Penelitian.....	43
3.3 Teknik Analisa Data.....	44
3.6 Definisi Operasional.....	46
3.7 Teknil pengumpulan data.....	50
3.8 Metodologi analisa.....	51
 BAB V :HASIL PENELITIAN, ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	47
5.1 Kondisi Geografis Kabupaten Jember.....	47
5.2 Gambaran Umum Pendidikan di Kabupaten Jember.....	49
5.3 Pendidikan dan Desentralisasi	56
5.4 Gambaran Umum Dewan Pendidikan Kabupaten Jember.....	59
5.5 Hasil Penelitian	63
5.5.1 Implementasi Peran dan Fungsi dewan pendidikan Jember berdasarkan lampiran 1 Kepmendinas No 44/ U / 2002 tentang Dewan pendidikan dan Komite sekolah	63
5.6 Faktor komunikasi.....	68
5.6.1 Transmisi	70

5.6.2	Kejelasan.....	71
5.6.3	Konsistensi.....	72
5.7	Faktor Sumber- Sumber.....	70
5.7.1	Staf.....	70
5.7.2	Informasi.....	71
5.7.3	Wewenang.....	72
5.7.3.1	Peran Dewan Pendidikan : pemberi pertimbangan (<i>advisor</i>).....	72
5.7.3.2	Peran Dewan Pendidikan : Sebagai Pendukung (<i>supporting</i>).....	73
5.7.3.3	Peran Dewan Pendidikan : Sebagai Pengontrol (<i>controlling</i>).....	74
5.7.3.4	Peran Dewan Pendidikan : Sebagai Mediator.....	75
5.8	Faktor Kecenderungan – Kecenderungan.....	77
5.9	Struktur Birokrasi.....	79
4.9.1	Standart Operating Prosedures(SOP).....	79
4.9.2	Fragmentasi	79
5.10	Efektifitas Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pendidikan Kabupaten Jember berdasar lampiran 1 Kepmendinas No 44/ U / 2002 tentang Dewan pendidikan dan Komite sekolah.....	82
5.11	Analisis data.....	90
BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN.....		107
6.1	Simpulan.....	107
6.2	Implikasi Teoritik.....	108
6.3	Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.		110
LAMPIRAN		